



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**Disusun :
Tahun 2024**

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023**

**Disusun :
TAHUN 2024**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 12 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.

Pembina Tingkat I
NIP 19780416 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan hidayah- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKJIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat bagi seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Sidoarjo, 23 Februari 2024

Mengetahui,

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19700926 199003 1 005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	6
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Analisa Capaian Kinerja.....	12
C. Realisasi Kinerja Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Pemecahan Masalah / Tindaklanjut	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan	2
Tabel 1.2	Data ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin	2
Tabel 1.3	Data ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Pendidikan ..	3
Tabel 1.4	Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah	3
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023	6
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 per Program	8
Tabel 2.4	Rincian Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 per Sasaran	8
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023	11
Tabel 3.2	Capaian Indeks Kualitas Kebijakan	12
Tabel 3.3	Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2021-2023	12
Tabel 3.4	Capaian Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	14
Tabel 3.5	Tren Realisasi Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	14
Tabel 3.6	Data Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021-2023	15
Tabel 3.7	Capaian Persentase Kinerja Urusan Tercapai	18
Tabel 3.8	Tren Realisasi Peresentase Kinerja Urusan tercapai tahun 2021-2023	18
Tabel 3.9	Pelaksanaan Urusan Kinerja Tercapai di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023	19
Tabel 3.10	Capaian Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik	23
Tabel 3.11	Capaian nilai IPP pada 3 role model di lingkungan Kabupaten Sidoarjo oleh Kementrian PANRB	23
Tabel 3.12	Capaian Nilai <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i>	25
Tabel 3.13	Tren Nilai MCP Tahun 2021-2023	26
Tabel 3.14	Perolehan Nilai MCP berdasarkan area penilaian	26
Tabel 3.15	Capaian Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	27
Tabel 3.16	Tren Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	27
Tabel 3.17	Nilai SAKIP dari masing-masing komponen	28
Tabel 3.18	Capaian Nilai RB	29
Tabel 3.19	Tren Nilai RB	29
Tabel 3.20	Capaian Nilai IPP	30
Tabel 3.21	Tren Nilai IPP Tahun 2021-2023	30

Tabel 3.22	Formulir Penilaian IPP	31
Tabel 3.23	Capaian Niai SKM	32
Tabel 3.24	Tren Nilai SKM	32
Tabel 3.25	Nilai SKM per Unsur Pelayanan	33
Tabel 3.26	Perkembangan indikator kinerja sasaran Setda Tahun 2021-2023	34
Tabel 3.27	Perkembangan indikator kinerja Setda terhadap target akhir Renstra	35
Tabel 3.28	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	37
Tabel 3.29	Program / kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.....	39
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	2
---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan.....	13
Grafik 3.2	Persentase capaian nilai SAKIP PD.....	15
Grafik 3.3	Tren Realisasi Peresentase Kinerja Urusan tercapai tahun 2021-2023.....	19
Grafik 3.4	Nilai MCP Tahun 2021-2023.....	26
Grafik 3.5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah 2021-2023.....	27
Grafik 3.6	Tren Nilai IPP Tahun 2021-2023	30
Grafik 3.7	Tren Nilai SKM.....	32
Grafik 3.8	Target dan realisasi indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023	33
Grafik 3.9	Perkembangan realisasi indikator kinerja Setda Tahun 2021-2023.....	35
Grafik 3.10	Perbandingan target akhir Renstra dengan Realisasi Tahun 2023.....	36

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Sekretariat Daerah memiliki 2 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja. Tujuan dari Sekretariat daerah adalah ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*** dengan 2 sasaran yaitu

1. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, Sasaran ini didukung oleh 5 indikator kinerja.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah
Sasaran ini didukung oleh 4 indikator kinerja.

Untuk capaian dari 9 indikator kinerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian target dan realisasi 2023 (%)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	72	80,98	112,47 %
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	77%	51,02 %	66,26%
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%
		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100%	151,51%
		Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	88,50	91,28	102,82%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,50	85,97	101,73%
		Nilai RB	34,85 (96%)	-	-
		Nilai IPP	4,19 (A-)	4,20(A-)	100,23%
		Nilai SKM	91,00 (SB)	94,98 (SB)	104,37%

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 9 indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100 % sebanyak 6 indikator, yaitu :
 - a. Indeks kualitas Kebijakan
 - b. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)
 - c. Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)
 - d. Nilai SAKIP PD
 - e. Nilai IPP
 - f. Nilai SKM
2. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator, yaitu
 - a. Persentase Kinerja Urusan tercapai

3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator, yaitu
 - a. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator, yaitu
 - a. Nilai RB

Secara keseluruhan dari target kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 dan diambil rata rata nilai capaian kinerja serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 106 tahun 2022 bahwa Hasil Penilaian dan Predikat Kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Sidoarjo maka rata rata capaian kinerja setda sebesar 104,92% dengan kategori sangat baik atau diatas ekspektasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

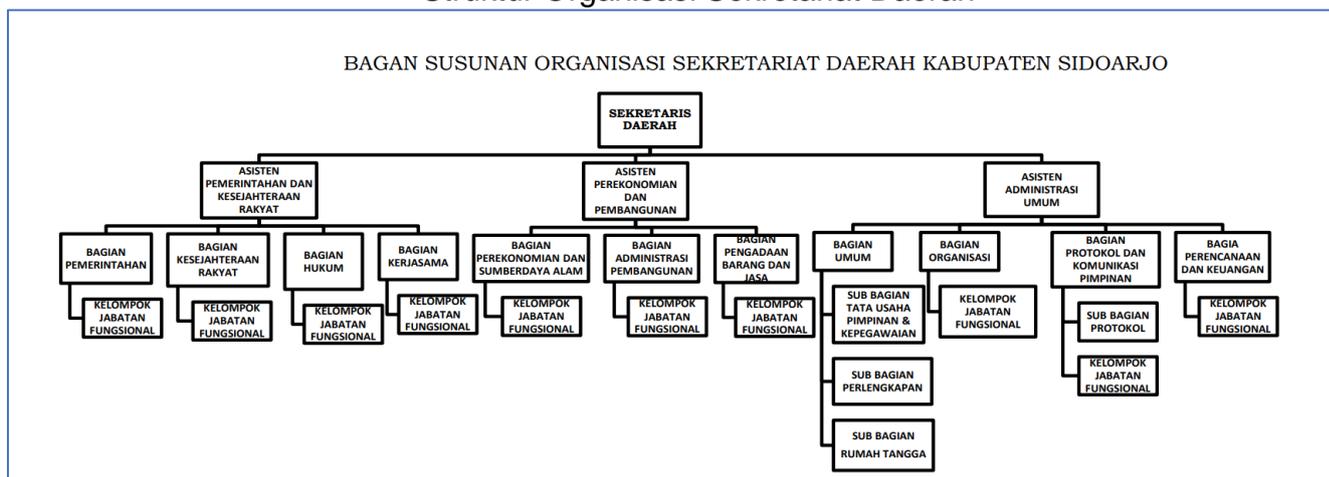
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Melalui peraturan daerah di atas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dibantu oleh Asisten dan Bagian. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Sumber : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang SOTK Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 150 orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023 :

Tabel 1.1
Data ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala / Pimpinan Tinggi	6
2	Administrator	9
3	Pengawas	2
4	Pelaksana	109
5	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	12
7	Jabatan Fungsional Terampil	1
8	Jabatan Fungsional Mahir	2
9	Jabatan Fungsional Penyelia	1
Jumlah		150

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2023

Tabel 1.2
Data ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	85

2.	Perempuan	65
Jumlah		150

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2023

Tabel 1.3

Data ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	20
2.	S1	74
3.	D3	18
4.	SLTA	37
5.	SMP	1
Jumlah		150

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2023

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 1.4

Pemetaan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kebijakan daerah yang disusun masih belum berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat pemecahan penyelesaian kebijakan Belum secara optimal melibatkan fungsi sekretariat daerah dalam menyusun kebijakan 	Belum memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan

2	Pengkoordinasian perangkat daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman SAKIP masih belum optimal • Pengumpulan data LPPD belum optimal 	Belum optimalnya pemahaman SDM terhadap SAKIP
---	---	--	---

Sumber : Data Perencanaan, diolah Tahun 2023

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah;
2. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral);
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
4. Kualitas data LPPD Perangkat Daerah; dan
5. Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tersebut memuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha”.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	NA	70	72	75	77	80
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal A	50 %	75 %	77%	78 %	80 %	100 %
			Persentase Kinerja Urusan Tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase IPP Perangkat Daerah dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	66%	66%	100%	100%	100%
			Nilai <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i>	NA	88	88,5	89	89,5	90
2		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	82	84	84,5	84,7	85	85,5
			Nilai RB	33,91	34,48	34,85	35,21	35,57	36,3
			Nilai IPP	B (3,88)	A-(4,01)	A-(4,19)	A-(4,20)	A-(4,30)	A-(4,51)
			Nilai SKM	90 (Sangat Baik)	90,50 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)	91,50 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	92,50 (Sangat Baik)

Sumber : Data Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	72
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	77%
		Persentase Kinerja Urusan Tercapai	100%
		Persentase IPP Perangkat Daerah dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%
		Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	88,50
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP	A (84,50)
		Nilai RB	34,85 (96%)
		Nilai IPP	4,19 (A-)
		Nilai SKM	91,00 (Sangat Baik)

Sumber : Data Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Dalam menentukan target Kinerja Utama tahun 2023 dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Target kinerja Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 adalah 72 didasarkan pada renstra Setda tahun 2021-2026 dimana target tahun 2023 sebesar 72, melihat hasil capaian nilai IKK tahun 2022 adalah 75,02 sangat tinggi, namun didasarkan pada lokus kebijakan yang dinilai (Perda dan Perbup) penilaian IKK tidaklah sama, hal ini yang tidak bisa mengakumulasi penilaian tahun lalu digabung dengan tahun saat ini, sehingga target 2023 disamakan sebagaimana yang tercantum di Renstra Sekretariat Daerah.
2. Target kinerja 2023 adalah sebesar 77% PD memperoleh nilai SAKIP A, yang didasarkan capaian persentase PD dengan nilai SAKIP A tahun 2022 adalah 46%

dari target 75%, sehingga akan ditingkatkan sebesar 31% sebagai target kinerja tahun 2023, guna mendukung capaian 2026 adalah 100%.

- C. Persentase kinerja urusan tercapai 100% pada tahun 2022 guna mendukung pencapaian tahun 2026 sebesar 100%, sehingga target kinerja tahun 2023 adalah 100% sudah terlampaui.
- D. Pencapaian IPP *role model* adalah 100%, pada capaian tahun 2022 adalah 100% guna mendukung capaian tahun 2026 adalah 100% sehingga target kinerja tahun 2023 adalah 100%.
- E. Pada renstra Sekretariat Daerah tahun 2023 target MCP sebesar 88,5 hasil realisasi kinerja MCP adalah tahun 2022 adalah 94,91, dan target kinerja MCP tahun 2023 tetap disamakan dengan Renstra sebesar 88,50 dengan pertimbangan bahwa pedoman penilaian dan data yang diminta setiap tahunnya selalu ada perubahan. Hal ini untuk mendukung capaian pada target Renstra tahun 2026 yaitu 90.
- F. Realisasi Nilai SAKIP Setda Tahun 2022 yaitu 83,46 (A), untuk mendukung capaian target Renstra tahun 2026 yaitu 85,5 (A), maka ditetapkan target kinerja untuk Tahun 2023 yaitu 84,5 (A).
- G. Target kinerja Nilai RB tahun 2023 adalah 34,85 yang didasarkan pada hasil capaian nilai RB tahun 2022 adalah 34,76. Untuk tahun 2023 penilaian RB sudah tidak dilaksanakan lagi.
- H. Target kinerja Nilai IPP tahun 2023 adalah 4,19 (A-) yang didasarkan pada hasil capaian nilai IPP tahun 2022 adalah 4,19 (A-), hal tersebut untuk mendukung capaian target dalam renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 yaitu 4,51 (A-).
- I. Target kinerja Nilai SKM tahun 2023 adalah 91 (Sangat Baik) yang didasarkan pada hasil capaian nilai SKM tahun 2022 adalah 95,22 (Sangat Baik), hal tersebut untuk mendukung capaian target dalam renstra Sekretariat Daerah Tahun 2026 yaitu 92,5 (Sangat Baik).

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 113.316.910.460 dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 per Program

Nomor	Program	Anggaran tahun 2023 (Rp)
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	40.340.228.587
2	Perekonomian dan Pembangunan	6.186.151.488
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.790.530.385
	Jumlah	113.316.910.460

Sumber : DPA PAK Sekretariat Daerah Tahun 2023

Anggaran yang disediakan tersebut digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun anggaran yang tersedia sesuai dengan sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 per Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PAGU
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	a. Indeks kualitas Kebijakan b. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A c. Persentase Kinerja Urusan tercapai d. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) e. Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	798.027.440
			Penataan Organisasi	798.027.440
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.340.228.587
			Administrasi Tata Pemerintahan	842.149.509
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.643.247.040
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	938.917.098
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.915.914.940
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.186.151.488
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	201.655.240
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.388.159.026
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.426.337.222
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	170.000.000
			TOTAL	47.324.407.515
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	a. Nilai SAKIP b. Nilai RB c. Nilai IPP d. Nilai SKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.992.502.945
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.550.810

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.586.127.244
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.870.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.868.381.995
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.618.996.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.370.547.776
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.387.172.626
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.308.657.413
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.770.000.000
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.919.198.581
		TOTAL	65.992.502.945
TOTAL KESELURUHAN			113.316.910.460

Sumber : DPA-PAK Sekretariat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap peluang terjadinya celah kinerja (*performance gap*), maka dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian target dan realisasi 2023 (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	72	80,98	112,47 %	80	101,22 %
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	77%	51,02 %	66,25%	100 %	51,02 %
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%	100 %	100 %
		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100%	151,51 %	100 %	151,51 %
		Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	88,50	91	102,82 %	90	101,11 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,50	85,97	101,73 %	85,5	100,55 %
		Nilai RB	34,85 (96%)	-	-	-	-
		Nilai IPP	4,19 (A-)	4,20 (A-)	100,23%	4,51 (A-)	93,13 %
		Nilai SKM	91,00 (Sangat Baik)	94,98 (Sangat Baik)	104,37 %	92,5 (Sangat Baik)	102,68 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 9 indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 6 indikator, yaitu :
 - a. Indeks Kualitas Kebijakan
 - b. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)
 - c. Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)
 - d. Nilai SAKIP PD
 - e. Nilai IPP
 - f. Nilai SKM
2. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator, yaitu :
 - a. Persentase Kinerja Urusan tercapai
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator, yaitu :
 - a. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator, yaitu:
 - a. Nilai RB

B. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah

a. Indeks Kualitas Kebijakan

Tabel 3.2
Capaian Indeks Kualitas Kebijakan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Indeks kualitas Kebijakan	72	80,98	112,47 %	80	101,22 %

Sumber : Hasil Penilaian Mandiri IKK Tahun 2023 (Perbup no 33 tahun 2022)

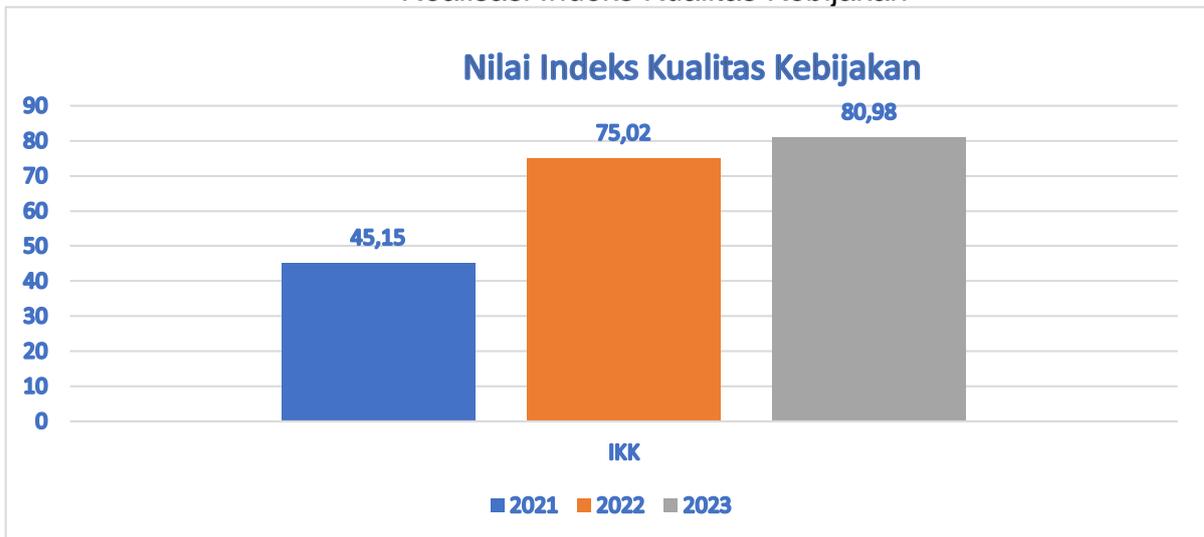
Capaian indikator Indeks kualitas Kebijakan tahun 2023 dengan realisasi 80,98 dari target 72, dengan persentase sebesar 112,47%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 80, maka pada Tahun 2023 sudah tercapai dengan persentase capaian sebesar 101,22%. Berkenaan realisasi tahun ini sudah melebihi target akhir Renstra, maka untuk target tahun berikutnya akan dilakukan reuiu menyesuaikan realisasi tahun ini. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	NA	70	72
Realisasi	45,15	75,02	80,98
Capaian	-	107,17%	112,47%

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Grafik 3.1
Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan



Sumber : olah data capaian realisasi IKK, Tahun 2021-2023

Mulai tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penilaian mandiri terhadap kualitas kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian IKK. Penilaian yang dilakukan mulai dari perencanaan, implementasi serta evaluasi kemanfaatan kebijakan. Penilaian dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah kemudaian diverifikasi oleh tim penilai (*board member*) yang berada di Sekretariat Daerah dan pendampingan dari Pihak Ketiga dalam pengukuran IKK tersebut.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2021 ke 2023 hasil penilaian IKK mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan Sekretariat Daerah telah menerapkan Fungsi Kebijakan dan Koordinasi dengan para analis kebijakan di masing-masing bagian dan melaksanakan fungsi koordinasi dengan Perangkat daerah di bawah koordinasi masing-masing asisten/bagian sebagaimana dalam Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat daerah pada Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2022.

Selain upaya tersebut, Sekretariat daerah juga telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada

Perangkat Daerah sehingga dalam menyusun kebijakan dapat berpedoman pada Perbup tersebut.

Untuk penilaian IKK juga dilaksanakan secara nasional oleh LAN RI pada tahun 2021 diperoleh nilai 32,35 dan tahun 2022 23,74. Untuk hasil penilaian IKK Tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dirilis dari LAN RI.

b. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A

Tabel 3.4
Capaian Persentase PD dengan Nilai SAKIP A

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	77%	51,02%	66,25%	100 %	51,05 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Capaian indikator Persentase PD dengan Nilai SAKIP A tahun 2023 dengan realisasi 51,02 dari target 77% dengan persentase capaian sebesar 66,25%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100%, maka pada Tahun 2023 belum tercapai. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Tren Realisasi dari Persentase PD dengan Nilai SAKIP A

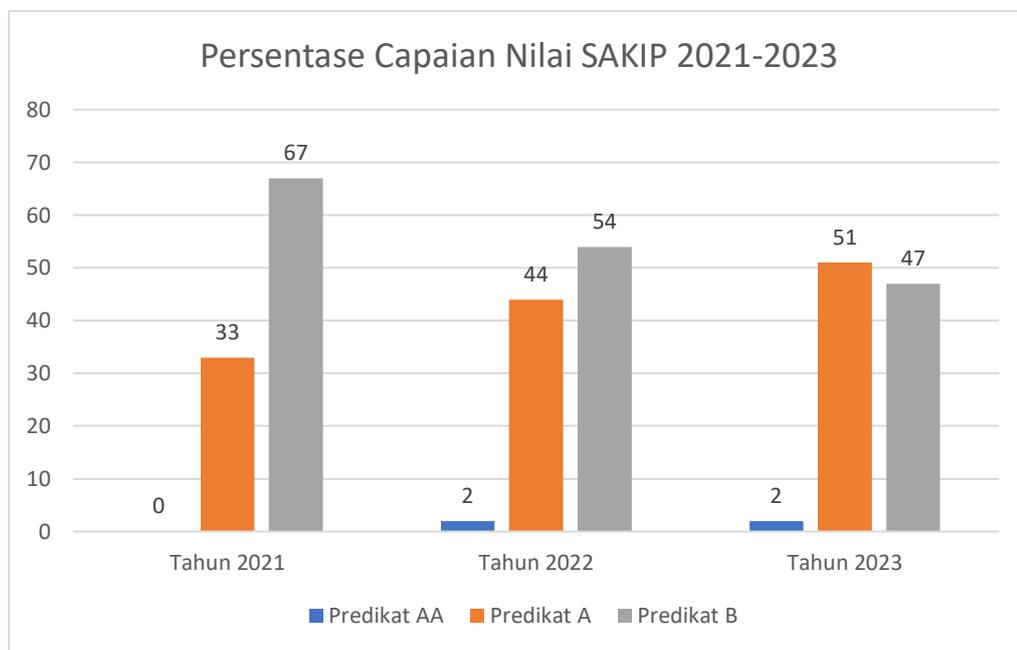
Tahun	2021	2022	2023
Target	50%	75%	77%
Realisasi	33,33%	46%	51,02%
Capaian	66%	61,33%	66,25%

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Tahun 2021 capaian Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP A sejumlah 16 PD atau 33,33% dan capaian tahun 2022 yang mendapatkan nilai SAKIP AA sejumlah 1 Perangkat Daerah atau 2%, dan memperoleh nilai A sejumlah 21 Perangkat daerah, sehingga total capaian Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA adalah 22 Perangkat Daerah atau 46% dari 48 Perangkat Daerah, sedangkan pada Tahun 2023 total capaian Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal A adalah 25 Perangkat Daerah atau 51,02% dari

49 Perangkat Daerah. Untuk lebih detailnya dapat dilihat di grafik dan tabel dibawah ini.

Grafik 3.2
Persentase capaian nilai SAKIP PD



Berikut adalah capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2021, 2022, dan 2023

Tabel 3.6
Data Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021-2023

NO	CAPAIAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	2021		2022		2023	
		NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
1	Rumah Sakit Umum Daerah	88.55	A	90,48	AA	91,05	AA
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85.86	A	85,26	A	86,57	A
3	Inspektorat Daerah	83.96	A	84,47	A	86,34	A
4	Sekretariat Daerah	82.94	A	83,46	A	85,97	A
5	Badan Kepegawaian Daerah	80.92	A	81,76	A	85,45	A
6	Badan Pelayanan Pajak Daerah	82.96	A	83,25	A	84,79	A
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	82.31	A	83,1	A	84,77	A
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	83.19	A	83,46	A	84,23	A
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.65	A	82,73	A	84,17	A
10	Dinas Pangan dan Pertanian	80.79	A	83,43	A	84,11	A
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	83.96	A	83,59	A	83,99	A
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	81.25	A	82,6	A	83,94	A
13	Kecamatan Taman	73.14	BB	80,3	A	83,6	A
14	Dinas Kesehatan	81.85	A	82,88	A	83,31	A
15	Dinas Tenaga Kerja	81.68	A	81,69	A	82,92	A
16	Satuan Polisi Pamong Praja	79.08	BB	80,34	A	81,78	A
17	Dinas Perikanan	80.42	A	80,98	A	81,28	A

18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	78.65	BB	80,05	A	81,18	A
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.99	BB	80,27	A	81,09	A
20	Kecamatan Sukodono	79.68	BB	80,49	A	81	A
21	Dinas Perhubungan	74.04	BB	79,78	BB	80,81	A
22	Kecamatan Gedangan	76.33	BB	77,56	BB	80,4	A
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAKB	75.77	BB	76,4	BB	80,38	A
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	78.49	BB	80,6	A	80,27	A
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	80.49	A	80,72	A	80,21	A
26	Kecamatan Porong	78.37	BB	79,33	BB	79,96	BB
27	Dinas Sosial	77.36	BB	79,21	BB	79,89	BB
28	Sekretariat DPRD	78.22	BB	79,7	BB	79,89	BB
29	Kecamatan Prambon	78.70	BB	79,54	BB	79,83	BB
30	Kecamatan Buduran	78.27	BB	79,45	BB	79,76	BB
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.98	BB	78,11	BB	79,75	BB
32	Kecamatan Krian	71.56	BB	73,49	BB	79,74	BB
33	Kecamatan Tanggulangin	77.11	BB	79,11	BB	79,71	BB
34	Kecamatan Waru	76.27	BB	77,11	BB	79,65	BB
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	77.34	BB	79,23	BB	79,59	BB
36	Dinas PUBM dan Sumber Daya Air	75.62	BB	78,47	BB	79,54	BB
37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.59	BB	77,94	BB	79,53	BB
38	Kecamatan Jabon	77.35	BB	78,91	BB	79,52	BB
39	Kecamatan Balongbendo	76.71	BB	79,32	BB	79,51	BB
40	Kecamatan Sedati	78.54	BB	78,81	BB	79,44	BB
41	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	74.60	BB	77,24	BB	79,35	BB
42	Dinas Perumahan, Permukiman, CKTR	74.53	BB	76,58	BB	78,76	BB
43	Kecamatan Tulangan	74.79	BB	77,45	BB	78,75	BB
44	Kecamatan Tarik	75.95	BB	77,67	BB	78,71	BB
45	Kecamatan Wonoayu	74.97	BB	77,98	BB	78,17	BB
46	Kecamatan Candi	75.21	BB	76,88	BB	78,15	BB
47	Kecamatan Sidoarjo	74.83	BB	75,48	BB	77,04	BB
48	Kecamatan Krembung	71.73	BB	73,5	BB	75,47	BB
49	RSUD Sibar	-	-	-	-	60,98	BB

Sumber : Data capaian nilai SAKIP PD, data dari Inspektorat Daerah Tahun 2023

Melihat grafik dan tabel diatas, maka Persentase PD dengan Nilai SAKIP minimal A dengan formula perhitungan : (Jumlah PD dengan Nilai SAKIP minimal A / Jumlah seluruh PD) x 100%, telah mengalami kenaikan.

Mulai tahun 2023, RSUD Sidoarjo Barat dimasukkan dalam penilaian SAKIP, sehingga ada total 49 PD yang dinilai. Dari hasil penilaian tersebut, meskipun belum mencapai target yaitu 77% dan hanya tercapai 51%, tetapi sudah menunjukkan tren kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil pencapaian

belum mencapai target dikarenakan belum optimalnya Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pengembangan kompetensi dan keterbatasan personil yang menangani SAKIP baik di Sekretariat Daerah maupun di Perangkat Daerah juga menjadi kendala.

Namun demikian kegagalan tahun ini menjadikan semangat dan motivasi Sekretariat Daerah dalam mengupayakan peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang sudah tertuang dalam rencana aksi dan target yang sudah terbagi dalam fungsi koordinasi Asisten dan Bagian-Bagian yang mengampu di dalamnya masing-masing. Upaya lain yang akan dilakukan, yaitu :

1. Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Perangkat daerah, dengan berkolaborasi dengan BAPPEDA dan Tim SAKIP Kabupaten;
2. Pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan TIM SAKIP dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi;
3. Secara berkala melaksanakan koordinasi atau bimbingan teknis kepada personil yang menangani SAKIP di Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi koordinasi masing-masing asisten/Bagian; dan
4. Pendampingan dan review Laporan Kinerja PD yang dilaksanakan oleh TIM SAKIP yang dikoordinasikan Bagian Organisasi.

Peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah bisa dilihat dari nilai rata-rata SAKIP PD, tahun 2021 sebesar 78,47, tahun 2022 sebesar 80,00 dan tahun 2023 nilai rata-rata SAKIP PD sebesar 80,90 sehingga ada peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dinilai Kepmenpan RB Tahun 2023 sebesar 77,50, maka nilai rata-rata SAKIP PD tahun 2023 masih diatas nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Kepmenpan RB.

c. Persentase Kinerja Urusan tercapai

Tabel 3.7
Capaian Peresentase Kinerja Urusan tercapai

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%	100 %	100 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

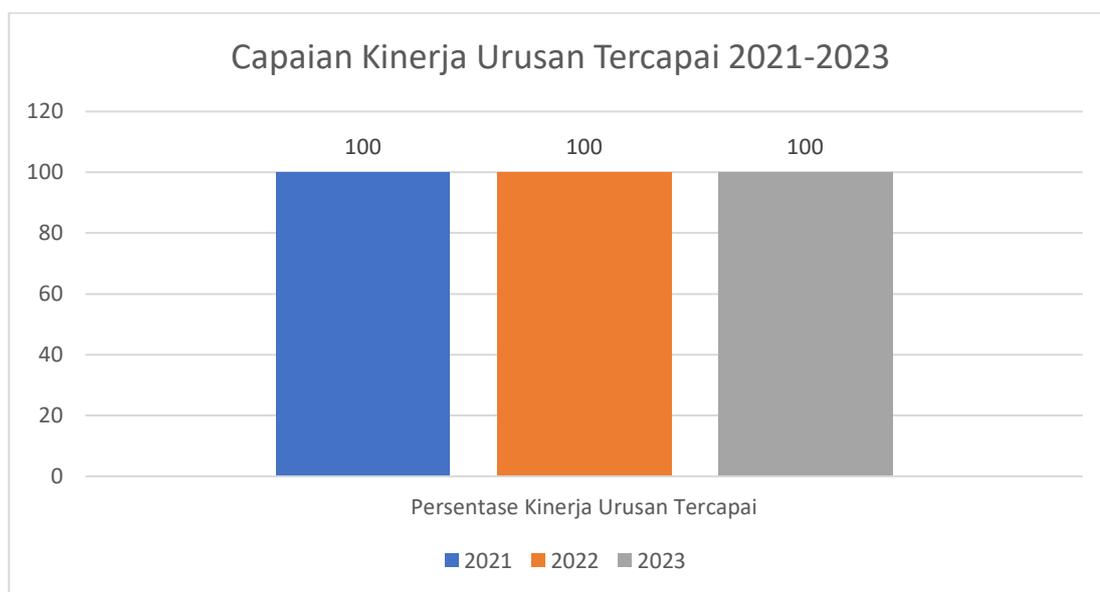
Capaian indikator Persentase Kinerja Urusan Tercapai tahun 2023 dengan realisasi 100% dari target 100% dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100%, maka pada Tahun 2023 sudah tercapai, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8
Tren Realisasi Peresentase Kinerja Urusan tercapai tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	100 %	100 %	100 %
Realisasi	100 %	100 %	100 %
Capaian	100 %	100 %	100 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Grafik 3.3
Tren Realisasi Peresentase Kinerja Urusan tercapai tahun 2021-2023



Pada tabel dan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa indikator persentase kinerja urusan tercapai dengan formulasi perhitungan : Jumlah urusan dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan yang dilaksanakan Pemda x 100%, telah tercapai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Terdapat 38 Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, Baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat 35 Urusan terdiri 124 IKK Outcome, 6 IKK Makro dan 504 IKK Output yang dilaksanakan oleh 26 OPD Pengampu, adapun 3 urusan tidak dilaksanakan karena memang urusan tersebut tidak dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo karena tidak ada obyeknya, berikut adalah tabel urusan dan perangkat daerah pengampu urusan :

Tabel 3.9
Pelaksanaan Urusan Kinerja Tercapai di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Urusan	OPD Pengampu	Jumlah Target Kinerja Urusan	Jumlah Kinerja Urusan yang tercapai	Capaian
1.	Makro	Badan Perencanaan Daerah	6	6	100%
2.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	4	100%
3.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	14	100%

4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air; b. Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	10	10	100%
5.	Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	5	5	100%
6.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Satuan Polisi Pamong Praja b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	7	100%
7.	Sosial	Dinas Sosial	2	2	100%
8.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	5	5	100%
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas P3AKB	3	3	100%
10.	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	1	1	100%
11.	Pertanahan	Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang	6	6	100%
12.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3	3	100%
13.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	100%
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas P3AKB	3	3	100%
15.	Perhubungan	Dinas Perhubungan	2	2	100%
16.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan informatika	3	3	100%
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMK	2	2	100%
18.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	100%
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3	3	100%
20.	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	100%
21.	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	100%
22.	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1	1	100%
23.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	2	100%
24.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2	2	100%
25.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	2	100%
26.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	1	1	100%
27.	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5	5	100%
28.	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	2	2	100%
29.	Kehutanan	-	0	0	100%
30.	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	0	0	100%
31.	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	3	100%
32.	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	6	100%
33.	Transmigrasi	-	0	0	100%
34.	Perencanaan dan Keuangan	a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah b. Inspektorat	6	6	100%
35.	Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	100%
36.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	3	3	100%
37.	Manajemen Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	4	100%
38.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	2	100%

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut menerangkan bahwa capaian Pelaksanaan Kinerja di Kabupaten Sidoarjo sudah 100% karena seluruh Target Kinerja Urusan dapat dicapai oleh perangkat daerah pengampu masing-masing urusan. Adapun yang kami jadikan target adalah refleksi dari capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo dalam 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2021-2022).

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku Sekretariat pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menghimpun data yang bersumber dari PD Pelaksana Urusan Pemerintahan, melainkan juga telah membentuk instrumen pendampingan serta Pelaporan LPPD dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/319/438.1.1.3/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan LPPD Kabupaten Sidoarjo. Adapun dalam SOP tersebut, telah meruntun mulai dari penginputan awal sampai dengan revidi akhir oleh APIP dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo diawali dengan pengisian capaian beserta bukti dukung capaian dalam Website portaldatakinerja.sidoarjokab.go.id yang merupakan sistem penyampaian oleh PD pengampu urusan LPPD dalam menyampaikan data serta capaian secara elektronik dan real time kepada Bagian Pemerintahan, selain itu bagian pemerintahan juga melakukan rangkaian Kegiatan Pra Evaluasi LPPD. Kegiatan Pra Evaluasi LPPD ini dilakukan dengan oleh instansi Internal maupun eksternal Kabupaten Sidoarjo.

Pra evaluasi merupakan kegiatan merevidi dan mengevaluasi data capaian dan bukti sesuai Indikator yang dinilai dalam LPPD, yang berasal dari PD penyelenggara Urusan LPPD. Evaluasi mencakup dari data capaian urusan tersebut, apakah masih memungkinkan untuk digali kembali potensi capaiannya agar dapat dilaporkan secara maksimal, dan bukti dukung yakni melihat tingkat legalitas data dapat dipertanggungjawabkan dan kesesuaian dengan data yang telah disampaikan. Adapun kegiatan pendampingan atau pra evaluasi, yang terdiri dari :

1. Pra Revidi awal oleh APIP dalam hal ini oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
2. Pra Evaluasi Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
3. Pra Evaluasi oleh masing-masing PD Pengampu Provinsi Jawa Timur;

4. Pra Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur; dan
5. Pra Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Penilai Nasional LPPD.

Pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang “sebenarnya” dilakukan oleh Tim Penilai Pusat Dan Daerah, sehingga diharapkan sebelum data capaian dan bukti dukung LPPD dinilai, telah dilakukan upaya dalam memaksimalkan capaian dan bukti dukung yang ada dan dalam upaya peningkatan pemahalam serta nilai capaian kinerja. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan strategi pra-evaluasi, yakni melakukan evaluasi dini terhadap capaian kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dinilai dalam LPPD, sebelum laporan dikumpulkan dan dinilai langsung oleh tim Penilai Pusat dan Daerah. Selain untuk meningkatkan kuantitas capaian kinerja indikator LPPD, dengan dilakukan evaluasi dini oleh tim evaluator, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas Bukti dukung yang valid sehingga bisa meningkatkan peringkat LPPD Kabupaten Sidoarjo di tingkat Nasional.

Selain itu, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah juga telah melakukan penyelarasan penetapan target capaian kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun dan telah dimasukkan dalam tupoksi, perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai. Dan dilakukan juga monitoring dan evaluasi setiap capaian kinerja setiap tribulan di tahun berjalan sebagai kontrol dalam pelaksanaan dalam masing-masing urusan pemerintahan. Hal tersebut merupakan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, harapannya capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tidak menurun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hasil penilaian LPPD sendiri sejak tahun 2019 tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan mulai di rilis kembali mulai tahun 2023 (capaian tahun 2021 yang dinilai tahun 2022 dan diumumkan tahun 2023) adapun Kabupaten Sidoarjo mendapatkan peringkat 5 Nasional dengan nilai 3,61 dengan kategori Tinggi serta diberikan penghargaan langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bertempat di Makassar pada Bulan April 2023.

Untuk capaian tahun 2022, yang dilaporkan dan dinilai tahun 2023 sudah diliris pada awal tahun 2024 sebagaimana surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023. Berdasarkan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo mendapat peringkat 2 Nasional dengan nilai yang meningkat mejadi 3,78 dengan kategori Tinggi.

c. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)

Tabel 3.10
Capaian Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100%	151,51 %	100%	151,51%

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Dengan formulasi perhitungan : (Jumlah OPD Role Model dengan kategori Sangat Baik (A-) / Jumlah OPD Role Model) x 100%

Capaian indikator Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) tahun 2023 dengan realisasi 100% dari target 66% dengan persentase sebesar 151,51%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100%, maka pada Tahun 2023 sudah tercapai.

Pada tahun 2021-2022, yang menjadi role model penilaian di Kabupaten Sidoarjo adalah DPMPTSP dan DISPENDUKCAPIL. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami perubahan, yang menjadi role model yaitu Kecamatan Taman, Dinas Sosial dan RSUD.

Tabel. 3.11
Capaian nilai IPP pada 3 role model di lingkungan Kabupaten Sidoarjo oleh Kementarian PANRB

Unit Kerja Role Model	2021	2022	2023
	Surat MenPANRB tgl 2 Maret 2022 nomor : B/37/PP.02/2022	KepMenPANRB nomor 1035 Tahun 2022	KepMenPANRB tgl nomor 795 Tahun 2023
RSUD	Sejak terjadi pandemic COVID-19 tidak menjadi lokus Evaluasi KepmenPAN-RB		4,72 A Prima
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4,57 A Pelayanan Prima	4,57 A Pelayanan Prima	Pemantauan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4,03 A- Sangat Baik	4,47 A- Sangat Baik	Pemantauan
Kecamatan taman	-	-	4,39 A-

			Sangat Baik
Dinas Sosial	-	-	4,19 A- Sangat Baik
Kabupaten Sidoarjo	4,3 A- Sangat Baik	4,52 A Pelayanan Prima	4,43 A- Sangat Baik

Sumber : Data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Pada Tahun 2021-2022 lokus penilaian pada Dispendukcapil, DPMPTSP, seharusnya RSUD juga menjadi role mode penilaian tapi sejak adanya pandemi Covid-19, RSUD tidak dilakukan penilaian sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 2023, dilakukan penilaian kembali pada RSUD serta pada Kecamatan Taman dan Dinas Sosial.

Capaian nilai IPP Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 4,43 (Sangat Baik) jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat penurunan sebesar 0,09 dari kategori Prima ke kategori Sangat baik, hal ini dikarenakan ada perubahan lokus dan instrumen penilaian oleh Kemenpan RB.

a. Unit lokus evaluasi (ULE) berbeda dari tahun sebelumnya

ULE 2022 : DPMPTSP dan Dispendukcapil

ULE 2023 : RSUD, Dinas Sosial, Kecamatan Taman

b. Instrumen penilaian PEKPPP mengalami perubahan, dari sebelumnya Permenpan Nomor 17 Tahun 2017, untuk tahun 2023 menggunakan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di tingkat nasional, Kabupaten Sidoarjo berada di peringkat 18 nasional, peringkat satu diraih oleh Kabupaten Banyuwangi dengan nilai 4,58 (selisih 0,15 dari perolehan Kabupaten Sidoarjo).

Upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan nilai IPP yang dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dengan Bagian Organisasi yaitu:

1. Melalui Kegiatan Penataan Organisasi pada sub kegiatan monitoring dan Evaluasi pelayanan publik dengan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen pelaporan PEKPP pada awal tahun;
2. Peningkatan kompetensi bagi pejabat dan pelaksana PEKPP tahun 2023 terus memberikan motivasi dan semangat ke Perangkat Daerah agar tetap memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat; dan

3. Penilain mandiri IPP Unit penyelenggara pelayanan publik sejumlah 110 UPP, sengan standar sesuai role model, yang dikeluarkan penilaian oleh Keputusan Bupati setiap tahun.

d. Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)

Tabel 3.12
Capaian Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	88,50	91	102,82%	90	101,11%

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Capaian indikator Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) tahun 2023 dengan realisasi 91 dari target 88,50 dengan persentase sebesar 102,82%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 90, maka pada Tahun 2023 sudah tercapai dengan dengan persentase capaian sebesar 101,11%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan meskipun masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Penurunan tersebut dikarenakan bahwa setiap tahun pedoman dan mekanisme penilaian MCP mengalami perubahan. Indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi juga mengalami perubahan sehingga pada Tahun 2023 ada beberapa data yang belum bisa dipenuhi oleh Kabupaten Sidoarjo.

Nilai capaian MCP Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sebesar 91,28 dengan ranking 87 dari 546 Wilayah se-Nasional dan ranking 21 dari 39 Wilayah se-Jawa Timur.

Upaya dalam pencapaian target sudah dilaksanakan secara maksimal oleh Sekretariat Daerah dengan membagi masing-masing peran Bagian dalam memangku dan koordinasi pada Perangkat Daerah sesuai area penilaian serta melaksanakan monitor secara berkala oleh Asisten dan Sekretaris Daerah, dengan membuat rencana aksi MCP Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Melakukan rapat koordinasi pemenuhan kelengkapan dokumen setiap tribulan sesuai target waktu yang ditentukan, dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk tiap area setiap tribulan.

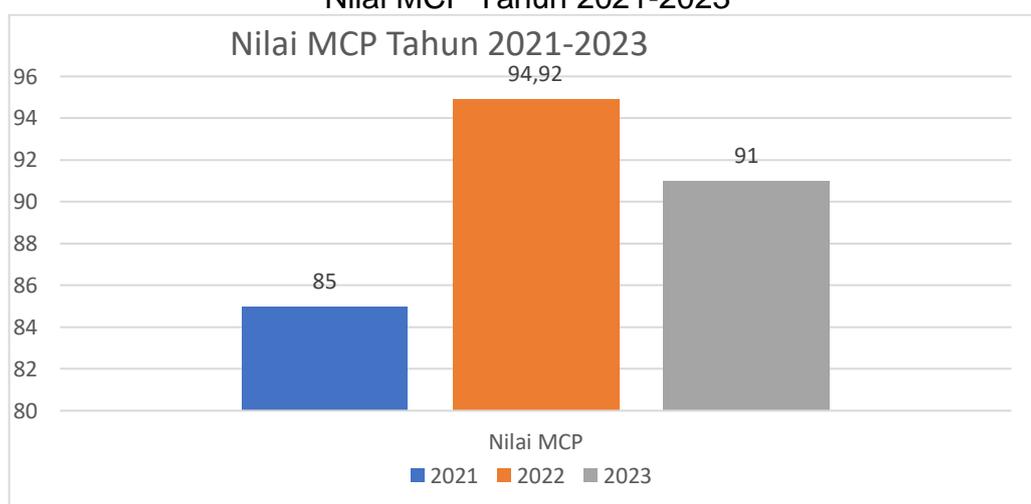
Tren nilai MCP selama 2021-2023 dapat dilihat sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 3.13
Tren Nilai MCP 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	80	87,5	88,50
Realisasi	85	94,92	91
Capaian	106,25 %	108,57	102,82 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Grafik 3.4
Nilai MCP Tahun 2021-2023



Perolehan nilai MCP diperoleh dari 8 aspek area penilaian dengan perolehan nilai per area sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perolehan Nilai MCP berdasarkan area penilaian

No	Area penilaian	2021	2022	2023
1	Tata kelola keuangan desa	92	100	100
2	Manajemen aset daerah	65,10	81,87	85
3	Optimalisasi Pajak Daerah	97,90	93,82	100
4	Manajemen ASN	95,10	97,86	88
5	Pengawasan APIP	94,40	96,94	92
6	Perizinan	100	100	79
7	Pengadaan Barang dan Jasa	84,50	91,93	96
8	Perencanaan dan penganggaran APBD	81,10	100	99
Total		85	94,92	91,28

Sumber : Data dari jagaid.com

2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah

a. Nilai SAKIP

Tabel 3.15
Capaian Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai SAKIP	84,50	85,97	101,73 %	85,5	100,55 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Untuk indikator pertama dari sasaran kedua yaitu Nilai SAKIP Sekretariat daerah. Capaian indikator Nilai SAKIP tahun 2023 dengan realisasi 85,97 dari target 84,50 dengan persentase sebesar 101,73%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 85,5 maka pada Tahun 2023 sudah tercapai dengan persentase capaian sebesar 100,55%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 3.16
Tren Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Tahun	2021	2022	2023
Target	82	84	84,50
Realisasi	82,94	83,46	85,97
Capaian	101,15	99,36	101,73 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Grafik 3.5
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah 2021-2023



Realisasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021–2023 mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2022 masih dibawah target tetapi untuk kategori masih masuk dalam kategori A. Capaian nilai SAKIP Sekretariat Daerah dari masing-masing komponen penilaian yaitu :

Tabel 3.17
Nilai SAKIP dari masing-masing komponen

No	Komponen yang dinilai	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	26,38	27,77
2	Pengukuran Kinerja	25,20	25,70
3	Pelaporan Kinerja	14,00	14,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,88	18,50
Nilai Hasil Evaluasi		83,46	85,97
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Sumber : Data Penilaian dari Inspektorat Daerah Tahun 2023

Beberapa rekomendasi hasil penilaian SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2023 antara lain yaitu :

1. Secara tertib dan konsisten untuk melaksanakan reuiu berkala atas dokumen Rencana Strategis sesuai dengan mekanisme SOP Reuiu Renstra yang telah ditetapkan dengan dilengkapi data-data pendukung hasil reuiu;
2. Memanfaatkan hasil pengukuran/capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward and pinishment bagi ASN di internal OPD secara kontinyu dan lebih optimal;
3. Melakukan reuiu atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD oleh instansi yang berwenang dalam rangka *quality asurance* penyajian laporan dan pertanggungjawaban data kinerja yang valid serta handal; dan
4. Menyempurnakan evaluasi internal berkala triwulan selanjutnya dengan menyajikan simpulan baik keberhasilan maupun kegagalan atas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi atasan, tindaklanjut atau upaya perbaikan, sebagai bahan untuk perbaikan kinerja organisasi kedepan.

Hasil pencapaian SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2023 sebesar 85,97 merupakan ranking 4 di tingkat Kabupaten Sidoarjo. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai nilai tersebut antara lain yaitu dengan menerapkan dan mengoptimalkan penerapan SAKIP dalam

pelaksanaan kerja sehari-hari dan menjadikan sebagai budaya kerja, serta akan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal, sebagai berikut :

1. Asistensi dan pendampingan penyusunan PK Sekretaris Daerah dan penjabaran rencana aksi ke Asiten dan Bagian-Bagian pada tribulan Pertama;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP, dengan menyusun rencana aksi atas hasil evaluasi implementasi AKIP SETDA, sebagaimana dalam lampiran;
3. Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; dan
4. Hasil evaluasi tribulan secara berkala yang akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat daerah.

b. Nilai RB

Tabel 3.18
Capaian Nilai RB

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai RB	34,85 (96%)	-	-	-	-

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Untuk indikator kedua sasaran kedua yaitu Nilai RB Sekretariat Daerah. Untuk tahun 2023 tidak ada penilaian RB, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 masih ada penilaian RB di Sekretariat Daerah yaitu dengan nilai sebagai berikut :

Tabel 3.19
Tren Nilai RB

Tahun	2021	2022	2023
Target	33,91 (93,42%)	34,48 (95%)	34,85 (96%)
Realisasi	33,91 (93,42%)	34,76 (95,76%)	-
Capaian	100%	100,81%	-

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

c. Nilai IPP

Tabel 3.20
Capaian Nilai IPP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai IPP	4,19 (A-)	4,20 (A-)	100,23%	4,51 (A)	93,13 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

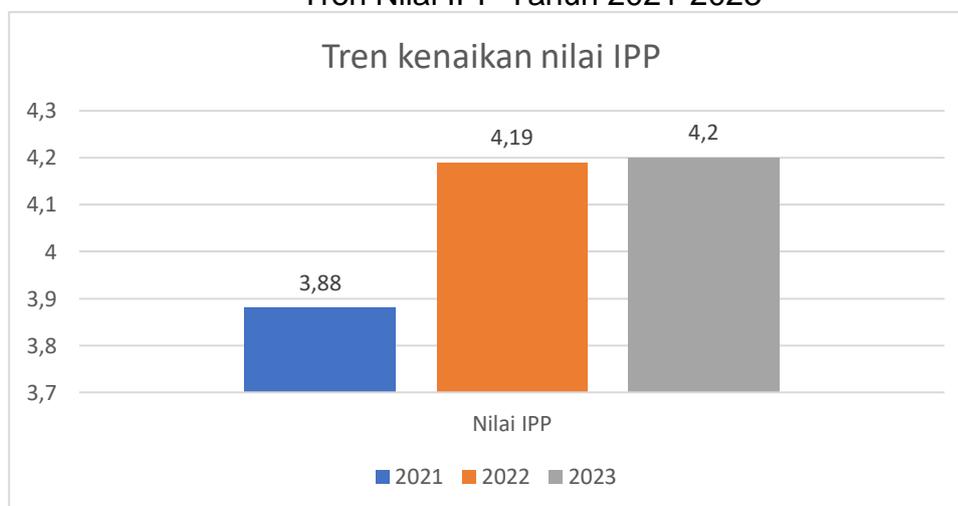
Untuk indikator selanjutnya yaitu Nilai IPP Sekretariat Daerah. Capaian indikator Nilai IPP tahun 2023 dengan realisasi 4,20 (A-) dari target 4,19 (A-) dengan persentase sebesar 100,23 %. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 4,51 (A) maka pada Tahun 2023 tercapai dengan persentase capaian sebesar 93,13%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.21
Tren Nilai IPP Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	B (3,88)	A- (4,01)	A- (4,19)
Realisasi	B (3,88)	A- (4,19)	A- (4,20)
Capaian	100 %	104,49%	100,24 %

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah, diolah Tahun 2023

Grafik 3.6
Tren Nilai IPP Tahun 2021-2023



Dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa ada tren kenaikan nilai IPP Sekretariat Daerah dari Tahun 2021-2023.

Ada tiga formulir penilaian untuk menentukan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), yaitu Formulir-01, Formulir-02, dan Formulir-03. Hasil evaluasi serta rekomendasi perbaikan dan nilai indeks pelayanan publik dari Sekretariat Daerah yaitu 4,20 kategori A- (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Formulir Penilaian IPP

No	Formulir Penilaian	Bobot	Nilai Indeks
1	Formulir-01 (Dokumen 6 Aspek)	30%	3,38
2	Formulir-02 (Presentasi dan Wawancara)	40%	4,56
3	Formulir-03(Survei Kualitas Pelayanan)	30%	4,56
Nilai IPP			4,20
Kategori Penilaian			A- (Sangat Baik)

Sumber : Hasil Penilaian IPP Sekretariat Daerah Tahun 2023

Formulir-01 yang meliputi dokumen 6 aspek, yaitu :

1. Kebijakan pelayanan;
2. Profesionalisme SDM;
3. Sarana dan prasarana;
4. Sistem informasi pelayanan publik;
5. Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
6. Inovasi.

Terhadap hasil penilaian tersebut, ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat daerah, antara lain yaitu :

1. Peningkatan kualitas sarpras parkir roda 2 dan roda 4 baik untuk pegawai maupun penerima layanan yang nyaman dan aman, dilengkapi dengan petugas parkir, pemeriksaan karcis parkir, CCTV, penitipan jaket/ helm, pelindung Kanopi dan parkir bagi disabilitas/ berkebutuhan khusus diberikan penanda.
2. Penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus/ kelompok rentan (lansia, ibu hamil/ menyusui, anak-anak, dan disabilitas)
3. Menerapkan budaya pelayanan yang meliputi Seragam khusus petugas pelayanan, menggunakan identitas nama lengkap, menggunakan PIN/ logo/ selempang, menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun), menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK untuk membangun budaya kerja yang positif dan sehat sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang lebih baik.

Terhadap capaian penilaian IPP Tahun 2023 dan hasil rekomendasi dari Tim Penilai, maka Sekretariat Daerah akan berkomitmen memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

d. Nilai SKM

Tabel 3.23
Capaian Nilai SKM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai SKM	91,00 (Sangat Baik)	94,98 (Sangat Baik)	104,37 %	92,5 (Sangat Baik)	102,68 %

Sumber : Hasil Penilaian SKM Sekretariat Daerah Tahun 2023

Untuk indikator selanjutnya dari sasaran kedua yaitu Nilai SKM Sekretariat daerah. Capaian indikator Nilai SKM tahun 2023 dengan realisasi 94,98 dari target 91 dengan persentase sebesar 104,37%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 92,50, maka pada Tahun 2023 sudah tercapai dengan persentase capaian sebesar 102,68%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami penurunan, sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.24
Tren Nilai SKM

Tahun	2021	2022	2023
Target	90	90,50	91,00
Realisasi	91,72 (Sangat Baik)	96,48 (Sangat Baik)	94,98 (Sangat Baik)
Capaian	101,91%	106,61%	104,37%

Sumber : Nilai SKM Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023

Grafik 3.7
Tren Nilai SKM



Pada Tahun 2023, nilai SKM yang diperoleh Sekretariat Daerah sebesar 94,98 dengan kategori Sangat Baik, jumlah responden yang melakukan penilaian terhadap

kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun 2023 adalah sejumlah 457 responden. Hasil penilaian SKM terdiri dari 9 unsur pelayanan, yang meliputi :

Tabel 3.25
Nilai SKM per Unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Kategori
U1	Persyaratan	3,80	Sangat Baik
U2	Sistem, mekanisme, prosedur	3,88	Sangat Baik
U3	Waktu penyelesaian	3,86	Sangat Baik
U4	Biaya/ tarif	3,89	Sangat Baik
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,84	Sangat Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,97	Sangat Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,91	Sangat Baik
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,92	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,89	Sangat Baik

Capaian nilai SKM tahun 2023 meskipun mengalami penurunan dari tahun 2022 tetapi masih masuk dalam kategori sangat baik dan masih dalam target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, bahwa untuk kedepannya Sekretariat Daerah akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayan

Secara umum, target dan realisasi kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 3.8
Target dan realisasi indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023



Sumber : Analisa Perencana, realisasi capaian di Januari 2024

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kebijakan daerah dengan melakukan pembahasan terlebih dahulu antara Perangkat Daerah inisiator dan bagian pemangku sebelum dibahas oleh Tim dari Bagian Hukum; dan
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi dan monitoring serta evaluasi secara berkala.

Pada sasaran pertama dengan 5 indikator, kesemuanya telah mencapai target kecuali indikator Persentase PD dengan Nilai SAKIP A belum mencapai target. Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah yang dikoordinasikan asisten dengan Bagian pada tahun 2023, untuk penguatan perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja masing-masing PD di bawah koordinasi Asisten;
2. Nilai SAKIP PD dijadikan sebagai target kinerja para Asisten dan bagian untuk mendongkrak nilai SAKIP PD, dan secara berkala (setiap tribulan dilaksnakan evaluasi internal Sekretariat daerah);
3. Meningkatkan koordinasi terkait pemenuhan data pendukung SAKIP; dan
4. Meningkatkan kompetensi penyusunan laporan kinerja masing-masing Perangkat daerah.

Tabel 3.26
Perkembangan indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021- 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks kualitas Kebijakan	45,15	75,02	80,98
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	33, 33 %	46 %	51,02 %
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	NA	100%	100 %
		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100 %	100 %

		Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	85	94,92	91
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	82,94	83,46	85,97
		Nilai RB	33,91	34,76	-
		Nilai IPP	3,88	4,19	4,20
		Nilai SKM	91,72	96,48	94,36

Sumber : Analisa Perencana, diolah Tahun 2024

Ada beberapa indikator yang masih belum ada datanya (NA) pada tahun 2021, karena pada tahun tersebut adalah masa transisi perubahan renstra yang lama (2016-2021) dengan renstra yang baru (2021-2026).

Grafik 3.9

Perkembangan realisasi indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023



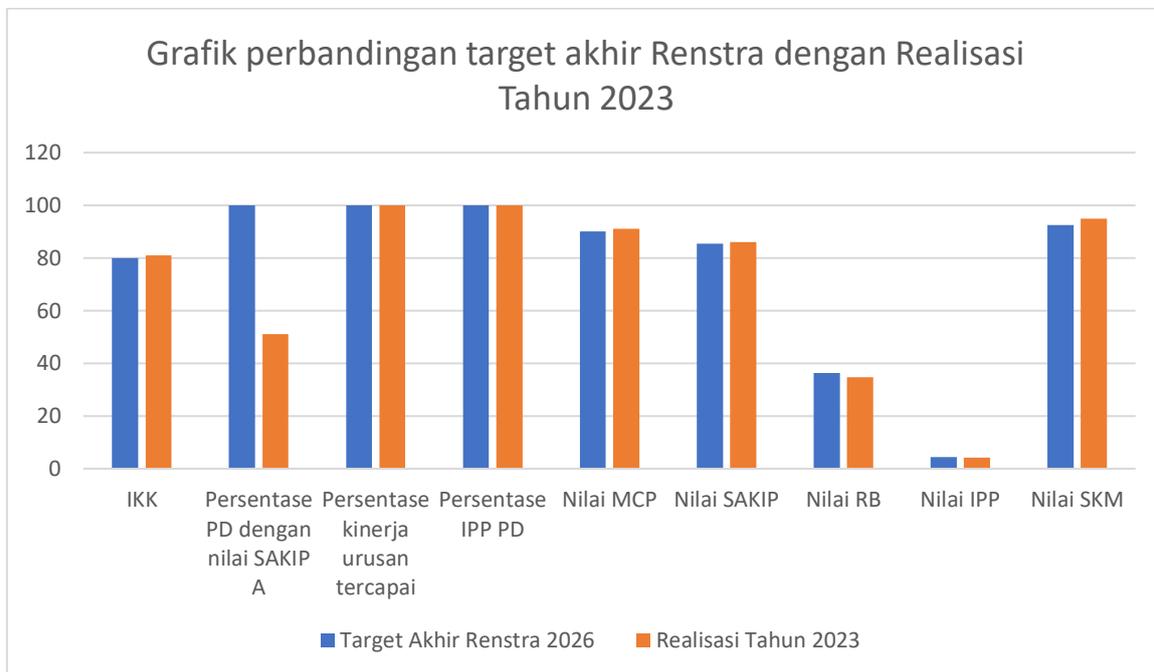
Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2023 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.27

Perkembangan indikator kinerja Sekretariat daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target akhir Renstra 2026	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks kualitas Kebijakan	80,98	80	101,22%
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	51,02%	100%	51,02%
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%

		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	100%	100%	100%
		Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	91	90	101,11%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah		Nilai SAKIP PD	85,97	85,5	100,55%
		Nilai RB	34,76	36,3	95,76%
		Nilai IPP	4,20	4,51	93,13%
		Nilai SKM	94,98	92,5	102,68%



C. Realisasi Kinerja Anggaran

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja.

Tabel 3.28
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KINERJA-CAPAIAN ANGGARAN)
					a	b	c		$\frac{(a * b) - c}{(a * b)} \times 100\%$
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks kualitas Kebijakan	72	80,98	112,47%				
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	77%	51,02%	66,25%				
		Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%				
		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100%	151,51%				
		Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	88,5	91	102,82%				
		Rata-rata Capaian kinerja					106,61	47.324.407.515	45.005.171.354
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	84,5	85,97	101,73%				
		Nilai RB	34,85 (96%)	34,76	99,74%				
		Nilai IPP	4,19 (A-)	4,20 (A-)	100,23%				
		Nilai SKM	91,00 (Sangat Baik)	94,98 (Sangat Baik)	104,37%				
		Rata-rata Capaian kinerja					101,52	65.992.502.945	64.063.939.460

Terkait pagu anggaran pada sasaran yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah adalah :

1. Sasaran pertama yaitu “Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah” dengan tingkat efisiensi sebesar 7,67% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :
 - a. Mengoptimalkan sumber daya Setda pada program dan kegiatan menunjang IKK, SAKIP, Kinerja Urusan, MCP sesuai dengan fungsi koordinasi dan kebijakan dalam lingkup Asisten dan Bagian-Bagian;
 - b. Meningkatkan koordinasi melalui dialog kinerja antar Bagian di Sekretariat Daerah maupun dengan Perangkat Daerah lain; dan
 - c. Melakukan evaluasi per tribulan capaian kinerja seesuai dnegan rencanan aksi masing-maisng Bagian yang dipimpin Sekretaris Daerah maupun Asisten yang membidangi.
2. Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah” dengan tingkat efisiensi sebesar 4,92% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :
 - a. Melaksanakan dialog kinerja setiap tribulan, yang dimulai pada saat penyusunan rencana aksi SAKIP, IPP, E-SKM Sekretariat Daerah pada saat yang dipimpin Sekretaris Daerah maupun asisten yang membidangi; dan
 - b. Melaksanakan budaya kinerja dan review renstra Setda dalam penyesuaian pencapaian target kinerja setda.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.29
Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	a. Indeks kualitas Kebijakan	72	80,98	112,47%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	798.027.440	778.331.160	97,53
		b. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	77%	51,02%	66,25%	Penataan Organisasi	798.027.440	778.331.160	97,53
		c. Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.340.228.587	38.508.298.118	95,46
		d. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	100%	151,51%	Administrasi Tata Pemerintahan	842.149.509	827.696.602	98,28
		e. Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	88,5	91	102,82%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.643.247.040	35.761.031.215	97,59
						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	938.917.098	878.678.360	93,58
						Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.915.914.940	1.040.891.941	54,33
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.186.151.488	5.718.542.076	92,44
						Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	201.655.240	198.286.882	98,33
						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.388.159.026	1.317.595.646	94,92
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.426.337.222	4.144.355.010	93,63
						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	170.000.000	58.304.538	34,30
				Rata-rata Capaian kinerja		106,61	TOTAL	47.324.407.515	45.005.171.354
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	a. Nilai SAKIP PD	84,5	85,97	101,73%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.992.502.945	64.063.939.460	97,08
		b. Nilai RB	34,85 (96%)	-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.550.810	9.465.150	89,71
		c. Nilai IPP	4,19 (A-)	4,20 (A-)	100,23%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.586.127.244	29.907.819.273	97,78
		d. Nilai SKM	91,00 (Sangat Baik)	94,98 (Sangat Baik)	104,37%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.870.000	151.878.499	99,35
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.868.381.995	6.791.840.901	98,89
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.618.996.500	1.279.759.000	79,05
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.370.547.776	8.229.335.130	98,31
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.387.172.626	2.325.071.928	97,40
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.308.657.413	3.266.999.223	98,74
						Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.770.000.000	2.769.798.245	99,99
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.919.198.581	9.331.972.111	94,08
		Rata-rata Capaian kinerja		101,52		65.992.502.945	64.063.939.460	97,08	

- c. bahwa untuk mencapai sasara pertama didukung oleh 3 program 9 kegiatan, sedangkan untuk sasaran kedua didukung oleh 1 program 10 kegiatan. Dari program/kegiatan tersebut diatas secara keseluruhan efektif telah mendukung ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah.

2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.790.530.385	64.842.270.620	97,08
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.550.810	9.465.150	89,71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.586.127.244	29.907.819.273	97,78
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.870.000	151.878.499	99,35
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.868.381.995	6.791.840.901	98,89
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.618.996.500	1.279.759.000	79,05
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.370.547.776	8.229.335.130	98,31
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.387.172.626	2.325.071.928	97,40
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.308.657.413	3.266.999.223	98,74
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.770.000.000	2.769.798.245	99,99
10	Penataan Organisasi	798.027.440	778.331.160	97,53
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9.919.198.581	9.331.972.111	94,08
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.340.228.587	38.508.298.118	95,46
1	Administrasi Tata Pemerintahan	842.149.509	827.696.602	98,28
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.643.247.040	35.761.031.215	97,59
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	938.917.098	878.678.360	93,58
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.915.914.940	1.040.891.941	54,33
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.186.151.488	5.718.542.076	92,44
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	201.655.240	198.286.882	98,33
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.388.159.026	1.317.595.646	94,92
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.426.337.222	4.144.355.010	93,63
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	170.000.000	58.304.538	34,30
TOTAL		113.316.910.460	109.069.110.814	96,25

dari data tersebut dapat diketahui capaian reaisasi anggaran di Sekretariat Daerah tahun 2023 sebesar 96,25%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sesuai sasaran yaitu :

1. Sasaran pertama yaitu "Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah" dengan 5 indikator sasaran, telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 106,61 dan dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan, maka ada efisiensi sebesar 7,67%.
2. Sasaran kedua yaitu "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah" dengan 4 indikator sasaran telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 101,52 dan dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan, maka ada efisiensi sebesar 4,92%.

Pada sasaran pertama, meskipun rata-rata capaian kinerja sudah diatas 100%, ada satu indikator kinerja yang belum memenuhi target yaitu Persentase PD dengan Nilai SAKIP A. Capaiannya masih 66% (target 77%, realisasi 51,02%), secara keseluruhan target realisasi kinerja Sekretaris Daerah tercapai 104,9% dalam kategori sangat baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini, antara lain yaitu :

- a. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b. Minimnya pengembangan kompetensi terkait ilmu SAKIP dan keterbatasan personil yang menangani SAKIP baik di Sekretariat Daerah maupun di Perangkat Daerah

B. Pemecahan masalah / Tindakan lanjut

Terhadap sasaran yang telah tercapai, maka akan dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sedangkan untuk indikator "Persentase PD dengan Nilai SAKIP A" yang belum tercapai maka akan dilakukan upaya antara lain yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dijadikan sebagai target kinerja para Asisten dan bagian untuk mendongkrak nilai SAKIP Perangkat Daerah, dan secara berkala (setiap tribulan dilaksanakan evaluasi internal Sekretariat daerah) untuk mengetahui perkembangan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
- b. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah yang dikoordinasikan Asisten dengan Bagian pada tahun 2024, untuk penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja masing-masing PD di bawah koordinasi Asisten; dan
- c. Meningkatkan koordinasi terkait pemenuhan data pendukung SAKIP berkolaborasi dengan TIM SAKIP Kabupaten untuk mengoptimalkan pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	72
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	77%
		Persentase Kinerja Urusan Tercapai	100%
		Persentase IPP Perangkat Daerah dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	68%
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	88,50
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai RB	34,85 (96%)
		Nilai SAKIP	A (84,50)
		Nilai IPP	4,10 (A-)
		Nilai SKM	91,00 (Sangat Baik)

JUMLAH ANGGARAN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 45.340.228.587	APBD
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 6.186.151.488	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 66.790.530.385	APBD
JUMLAH		Rp. 113.316.910.460	



B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi	: Sekretariat Daerah
Tugas	: Memimpin pelaksanaan kegiatan sekretariat daerah dan membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian administratif, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
Fungsi	: a. pengoordinasian penyusunan program Perangkat Daerah dan menyusun program Sekretariat Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Tujuan	: a. Status Kinerja LPPD b. Indeks Pelayanan Publik (IPP) c. Nilai SAKIP

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks kualitas Kebijakan	DO : Hasil penilaian kualitas kebijakan daerah yang sudah di implementasikan minimal 1 tahun (terhitung sejak penilaian)	Hasil penilaian IKK	Bagian Hukum

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>

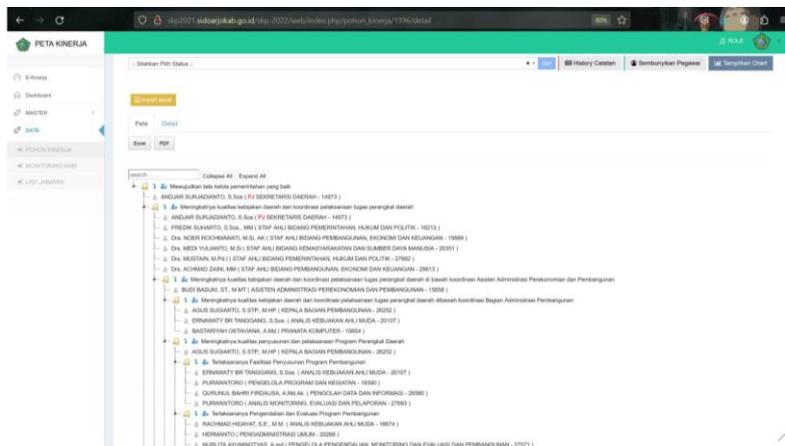
SEKRETARIAT DAERAH		PERIODE PENILAIAN : 2023	
PEGAJAW YANG DINILAI		PELIABAT PENILAI KINERJA	
Nama	ANDJAR SURDIANTO, S.Sos	Nama	H. AHMAD MUNDILOR, S.IP
NIP	39700061990611005	NIP	0
Pangkat / Gol.Ruang	TU/II / Pembina Utama Muda	Pangkat / Gol.Ruang	-/-
Jabatan	SEKRETARIS DAERAH	Jabatan	BUPATI SIDOARJO
Unit Kerja	SEKRETARIAT DAERAH	Unit Kerja	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

HASIL KERJA	
1. Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	<p>Rencana Aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Kabupaten Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi implementasi SAKIP Kabupaten Mengkoordinasikan arah perbaikan implementasi SAKIP pada tahun selanjutnya
2. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	<p>Rencana Aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan evaluasi atau kebijakan daerah melalui Dewan Perencanaan Menetapkan kebijakan yang akan direvisi melalui lepatuan dan pertimbangan Memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi kebijakan
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	<p>Rencana Aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah Menetapkan rencana tindak lanjut peningkatan implementasi SAKIP Sekretariat Daerah di Tahun 2023 Melakukan review terhadap Rencana Sekretariat Daerah Melakukan dialog kinerja dan evaluasi internal untuk seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Memverifikasi draft akhir penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah
4. Terlaksananya Peningkatan Profesionalitas ASN	<p>Rencana Aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan peningkatan kompetensi individu
5. Meningkatnya kualitas penyenggaraan pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo	<p>Rencana Aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengrealisasikan hasil akhir capaian kinerja penyenggaraan pelayanan publik Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya pengikut dan status kinerja penyenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo	<p>Rencana Aksi:</p>

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023

Dokumen ambil di SKP (MindMap)

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>



E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dokumentasi Penghargaan yang diterima

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>



F. Alternatif bisa disajikan pada bab 3, Capaian Kinerja

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbNv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>

Indikator dan target kinerja Perangot Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJPD	Satuan	Target	Realisasi
A. Indikator Tujuan:			
1. Status Kinerja UPD	Kategori Nilai	53 (4,3)	1 (3,78)
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Profil Nilai	A (4,70)	A (4,43)
3. Nilai SAKIP	Profil Nilai	A (81)	80 (77,50)
B. Indikator Sasaran:			
1. Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	72	80,38
2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	%	77	51,03
3. Persentase Kinerja Urusan tercapai	%	800	890
4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan target Baik (A-)	%	86	830

No.	Sasaran	Kode	Uraian/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (instansi)/ Kegiatan (instansi)/ Subkegiatan	Satuan	Tahun	Realisasi	Realisasi Capaian Kinerja Perangot Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangot Daerah u/d Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Ren Perangot Daerah tahun 2023

G. Matriks Renstra/ Renja

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbNv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>

Matriks	Tipe RPJPD	Indikator Kinerja	Uraian/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (instansi)/ Kegiatan (instansi)/ Subkegiatan	Tahun						Realisasi	Realisasi Capaian Kinerja Perangot Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangot Daerah u/d Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Ren Perangot Daerah tahun 2023	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026					

H. LHE SAKIP Tahun 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbNv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Aksi Yang Dilakukan	Hasil Yang Diharapkan	Jangka Waktu Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Koordinator/ Penanggung Jawab
1	PERENCANAAN KINERJA						
a	Melaksanakan revisi berkala atas dokumen rencana strategis sesuai dengan mekanisme SOP rewiu atas restra yang telah ditetapkan dengan diliputi data-data pendukung hasil rewiu secara terbit dan konsisten	Melaksanakan rewiu berkala atas dokumen rencana strategis setahun sekali sesuai dengan mekanisme SOP rewiu atas restra	1. Melaksanakan rapat atas rewiu dokumen rencana strategis setahun sekali sesuai dengan mekanisme SOP rewiu atas restra 2. Menetapkan berita acara atas rewiu dokumen rencana strategis	1. Hasil rapat atas rewiu dokumen rencana strategis setahun sekali sesuai dengan mekanisme SOP rewiu atas restra 2. Berita acara atas rewiu dokumen rencana strategis	12 Bulan	Januari - Desember 2024	Bagian Perencanaan
b	Mempersiapkan monitoring atas capaian target kinerja sasaran dibandingkan dengan target jangka menengah restra sampai dengan tahun berjalan yang diujikan dalam dokumen Lajp tahun berikutnya, hasil monitoring dilengkapi dengan analisa atas capaian masing masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan dan didukung dengan SOP monitoring atas capaian target kinerja restra	1. Membuat SOP monitoring atas capaian target kinerja restra 2. Melaksanakan monitoring atas capaian target kinerja berdasarkan SOP yang disusun	1. Membuat SOP monitoring atas capaian target kinerja restra 2. Melaksanakan monitoring atas capaian target kinerja berdasarkan SOP yang disusun	1. Tersusunnya SOP monitoring atas capaian target kinerja restra 2. Terlaksananya monitoring atas capaian target kinerja berdasarkan SOP yang disusun	1. 3 Bulan 2. 12 Bulan	1. Januari - Maret 2024 2. Januari - Desember 2024	Bagian Perencanaan
c	Memastikan secara efektif pencapaian atas target kinerja yang dipaparkan dalam dokumen perjanjian kinerja untuk mengukir keberhasilan individu sebagai dasar pemberian reward atas suatu kondisi kinerja	Melakukan rewiu SK pemberian reward dan punishment	Mengusulkan draft rewiu SK pemberian reward dan punishment	Revisi SK pemberian reward dan punishment	3 Bulan	Maret - Mei 2024	Bagian Umum
2	PENGUKURAN KINERJA						
a	Memastikan hasil capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment secara kontinyu dan lebih optimal	Melakukan rewiu SK pemberian reward dan punishment	Mengusulkan draft rewiu SK pemberian reward dan punishment	Revisi SK pemberian reward dan punishment	3 Bulan	Maret - Mei 2024	Bagian Umum
b	Melakukan rewiu berkala atas SOP pengumpulan data dan SOP jika ada kesalahan data kinerja sebagai mekanisme pengumpulan data kinerja agar data kinerja yang diujikan valid dan up to date	Melakukan rewiu secara berkala atas SOP pengumpulan data dan SOP jika ada kesalahan data kinerja	Mengusulkan draft rewiu secara berkala atas SOP pengumpulan data dan SOP jika ada kesalahan data kinerja	Revisi atas SOP pengumpulan data dan SOP jika ada kesalahan data kinerja	12 Bulan	Januari - Desember 2024	Bagian Perencanaan
3	PELAPORAN KINERJA						

I. Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>

RENCANA AKSI PENINGKATAN IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

No	Aspek / Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Aksi Yang Dilakukan	Hasil Yang Diharapkan	Jangka Waktu Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Koordinator / Penanggung Jawab
I PERENCANAAN KINERJA							
1	Melaksanakan reviu berkala atas Renstra dengan dukungan SOP Reviu Renstra	Melengkapi SOP Reviu Renstra untuk reviu berkala atas Renstra	Melengkapi SOP Reviu Renstra	SOP Reviu Renstra tersusun dan diterapkan saat reviu berkala atas Renstra	3 Bulan	April - Juni 2023	Perencana Ahli Muda
2	Menyempurnakan monitoring atas capaian target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yang disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan, didukung dengan SOP monitoring atas capaian target Renstra	Menyempurnakan monitoring atas capaian target (kinerja) dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja serta didukung dengan SOP monitoring atas capaian target Renstra	Melengkapi monitoring atas capaian target (kinerja) dengan analisa serta didukung dengan SOP monitoring atas capaian target Renstra	Monitoring atas capaian target (kinerja) dilengkapi dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja serta tersusun sesuai SOP monitoring atas capaian target Renstra	12 Bulan	Januari - Desember 2023	Perencana Ahli Muda
II PENGUKURAN KINERJA							
1	Memfaatkan hasil pengukuran/ capaian kinerja sebagai dasar	Mengoptimalkan hasil capaian kinerja sebagai dasar	Mengoptimalkan hasil capaian kinerja sebagai	Dasar pemberian reward dan punishment	12 Bulan	Januari - Desember 2023	Bagian Umum



Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

J. Inovasi Tahun 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>

DAFTAR INOVASI SEKRETARIAT DAERAH S.D. TAHUN 2023

- SIPRAJA (tahun 2020)** dari Bagian Pemerintahan
Fungsi : aplikasi pelayanan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mengkomodori pelayanan administrasi desa/kelurahan, kecamatan, instansi pemerintah daerah, instansi berkeadilan dan swasta di Kabupaten Sidoarjo. SIPRAJA terintegrasi secara digital yang diakses melalui internet pada webbase dan android playstore. SIPRAJA dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel elektronik, sehingga hasil layanan cukup diunduh dan dicetak mandiri dan gratis.
- Elektronik Kendali Daerah (e-Kenda)** tahun 2021 dari Bagian Administrasi Pembangunan
Fungsi : sebagai monitoring pembangunan Pekerjaan Fisik dan permasalahan paket pekerjaan fisik yang bermasalah / tidak on the track.
- SiMentalbaja** (tahun 2021) dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Fungsi : aplikasi yang digunakan oleh PKP dan Pokja melakukan dalam melakukan reviu Dokumen Penilaian Pengadaan. Berikut fitur-fitur yang ada di Mental Baja adalah sebagai berikut:
a. Reviu DPP
b. Timeline Proses Reviu DPP / Paket
c. Manajemen Pokja
d. Manajemen User
e. Laporan Beban Kerja
f. Cetak SPT
- e-SSH (Pengajuan Usulan Standar Harga secara Elektronik)** (tahun 2021) dari Bagian Administrasi Pembangunan
Fungsi : untuk mempermudah memantau usulan OPD yang akan diajukan ke SIPD.
- Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SKM)** (tahun 2021) dari Bagian Organisasi
Fungsi : untuk memfasilitasi antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya.

K. Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

<https://drive.google.com/drive/folders/1EFJX0Fq0M4g-CXbBnAv6e375jxOCnuT6?usp=sharing>



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH**
Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon : (031) 8921948, 8921960, 8921853 Faks : (031) 8941145
Email : setda@sidoarjo.go.id Website : www.sidoarjo.go.id

Kepada Yth : Bpk. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
Dari : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Tanggal : 27 Desember 2023
Nomor : 180/15243/438.1.1.3/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Rapat Penilaian Akhir IKK 2023

Mendasi : Surat Nota Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 180/15156/438.1.1.3/2023 Tanggal 22 Desember 2023 perihal Undangan Penilaian Akhir Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023.
Acara : Rapat Penilaian Akhir Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Pelaksanaan Hari/ Tanggal : Rabu / 27 Desember 2023
Tempat : Ruang OTODA Lt. 2 Sekretariat Daerah

Dari kegiatan diatas dapat kami sampaikan sebagai laporan sebagai berikut:
1. Verifikasi Data pada Bagian Pemangku (sebagaimana terlampir).
- Bagian Pemerintahan (6 Perbup dan 1 Perda)
- Bagian Kesejahteraan Rakyat (6 Perbup)
- Bagian Perencanaan dan SDA (5 Perbup)
- Bagian Administrasi Pembangunan (6 Perbup)
- Bagian Organisasi (1 Perbup)
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (1 Perbup)
- Bagian Perencanaan dan Keuangan (1 Perbup dan 1 Perda)

Lampiran Surat Nomor : 700/3486/438.4/2023 Tanggal : 07 Desember 2023

DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI AKIF TAHUN 2023

No	Nama OPD	Nilai	Predikat	No	Nama OPD	Nilai	Predikat
1	BKPD Sidoarjo	91,05	AA	26	Kecamatan Pongor	79,36	BB
2	Kantor Kecamatan Pongorampan Daerah	86,57	A	27	Dinas Jember	79,89	BB
3	Inspektori Daerah	86,34	A	28	Sekretariat DPRD	79,89	BB
4	Sekretariat Daerah	85,97	A	29	Kecamatan Prambon	79,83	BB
5	Kantor Kecamatan Sidorak	85,45	A	30	Kecamatan Bulutani	79,76	BB
6	Kantor Kecamatan Tajuk Bumi	84,79	A	31	Badan Keselamatan Bangsa dan Politik	79,75	BB
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	84,77	A	32	Kecamatan Wiro	79,74	BB
8	Kantor Pengawasan Keuangan dan Audit Daerah	84,23	A	33	Kecamatan Tenggulang	79,71	BB
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,17	A	34	Kecamatan Hono	79,65	BB
10	Dinas Perumahan dan Permukiman	84,11	A	35	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,59	BB
11	Dinas Peradilan dan Usaha Mikro	83,99	A	36	Dinas PU dan Marga dan SDA	79,54	BB
12	Dinas Perencanaan, Model dan ITSP	83,94	A	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,53	BB
13	Kecamatan Tumpang	83,60	A	38	Kecamatan Jabon	79,52	BB
14	Dinas Kesehatan	83,35	A	39	Kecamatan Babalingendo	79,51	BB
15	Dinas Tenaga Kerja	82,92	A	40	Kecamatan Sedati	79,44	BB
16	Dinas Perikanan	81,28	A	41	Dinas Perhubungan, Olahraga dan Pariwisata	79,36	BB
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,18	A	42	Dinas Perumahan dan Pemukiman OKTA	79,26	BB
18	Dinas Perencanaan dan Pengembangan Bangsa Daerah	81,09	A	43	Kecamatan Tulung	79,25	BB
19	Dinas Perencanaan Strategis	81,00	A	44	Kecamatan Tark	79,21	BB
20	Dinas Perhubungan	80,85	A	45	Kecamatan Sironorejo	79,20	BB
21	Kecamatan Getasan	80,40	A	46	Kecamatan Landi	79,15	BB
22	Dinas PPA dan M	80,38	A	47	Kecamatan Sidorejo	77,61	BB
23	Dinas Perindustri dan Perdagangan	80,27	A	48	Kecamatan Kerebung	75,47	BB
24	Dinas Perindustri dan Perdagangan	80,27	A	49	BKPD Sidoarjo-Barat	66,98	B
25	Dinas Perindustri dan Perdagangan	80,21	A				

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO
Dibundling secara elektronik dan
KIPRA SurjoDANTO, S.Sos., CGCE
18 Desember 2023
ANDJAR SURJADANTO, S.Sos., CGCE
Pembina Utama Muda
NP19700261990031005